

EFEKTIVITAS PROGRAM BANTUAN PANGAN NON-TUNAI BERUPA CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DALAM RANGKA PEMBERIAN BANTUAN PANGAN DI DESA PUGAAN KECAMATAN PUGAAN KABUPATEN TABALONG

Hasanah¹, Reno Affrian², Mahdalina³

Program Studi Administrasi Publik

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai

Email : hasanahsyaina@gmail.com

ABSTRAK

Masalah keefektifan dalam adanya program bantuan pangan non tunai yang ada di Desa Pugaan Kecamatan Pugaan. Berdasarkan hasil observasi awal dan data yang diperoleh maka dapat dilihat fenomena permasalahan yaitu kurang tepatnya sasaran penerima program bantuan pangan non tunai, kurangnya sosialisasi yang dilakukan dari pihak aparat Desa, kurang jelasnya waktu pengambilan beras/pangan pada program bantuan pangan non tunai. Penelitian ini bertujuan untuk (1) mendeskripsikan dan menganalisis Efektivitas Program Bantuan Pangan Non-Tunai dan (2) mendeskripsikan dan menganalisis faktor yang mempengaruhi Efektivitas Program Bantuan Pangan Non-Tunai di Desa Pugaan Kecamatan Pugaan Kabupaten Tabalong. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penentuan informan secara Purposive Sampling (pengambilan sampel secara sengaja). Teknik analisis yang digunakan adalah kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Efektivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai Di Desa Pugaan Kecamatan Pugaan Kabupaten Tabalong dapat dikatakan cukup efektif, hal ini dilihat dari fenomena permasalahan yang masih belum efektif. (2) Faktor pendorong, kesesuaian dengan SOP dan fasilitas yang memadai. (3) faktor penghambat, kurangnya ketepatan waktu dalam pelaksanaan dan sosialisasi yang masih kurang jelas. Saran untuk perbaikan kedepannya dalam program bantuan pangan non tunai.

Kata Kunci: Efektivitas, Bantuan Pangan Non Tunai, Desa Pugaan Kecamatan Pugaan Kabupaten Tabalong

ABSTRACT

The problem of effectiveness in the non-cash food assistance program in Pugaan Village, Pugaan District. Based on the results of initial observations and the data obtained, it can be seen that problem phenomena are the lack of precise targeting of recipients of the non-cash food assistance program, lack of socialization carried out by village officials, lack of clarity regarding rice/food collection times in the non-cash food assistance program. This research aims to (1) describe and analyze the effectiveness of the Non-Cash Food Assistance Program and (2) describe and analyze the factors that influence the Effectiveness of the Non-Cash Food Assistance Program in Pugaan Village, Pugaan District, Tabalong Regency. The research method used is a descriptive method with a qualitative approach. Determining informants using Purposive Sampling (deliberate sampling). The analysis techniques used are data condensation, data presentation, and drawing conclusions. The results of the research show that (1) The effectiveness of the Non-Cash Food Assistance Program in Pugaan Village, Pugaan District, Tabalong Regency can be said to be quite effective, this can be seen from the problem phenomenon which is still not effective. (2) Driving factors, conformity with SOP and adequate facilities. (3) inhibiting factors, lack of timeliness in implementation and unclear socialization. Suggestions for future improvements in the non-cash food assistance program.

Keyword: Effectiveness, non-cash food assistance program, Pugaan Village, Pugaan District, Tabalong Regency

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang terdiri dari berbagai pulau dan memiliki tingkat penduduk relatif tinggi, hal ini menimbulkan beberapa masalah bagi Indonesia terutama mengenai kemiskinan. Kemiskinan ialah masalah yang dihadapi diberbagai negara tidak hanya di Indonesia saja. Indonesia merupakan negara berkembang yang memiliki tingkat kemiskinan yang relatif tinggi. Namun, pada

tahun 2022 tingkat kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan walaupun tidak dengan hasil yang signifikan, tingkat kemiskinan di Indonesia per maret 2022 kembali menurun menjadi 9,54% dari semula 9,71%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan menurun ditengah tekanan harga komoditas dunia, khususnya harga pangan dan energi yang berdampak pada harga-harga domestik dan daya beli masyarakat (Kemenkeu 2022).

Ada beberapa kajian mengenai program bantuan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat kurang mampu. Berdasarkan PERMENSOS Nomor 1 tahun 2019 tentang penyaluran belanja bantuan sosial di lingkungan kementerian sosial disebutkan bahwa bantuan sosial tersebut adalah bantuan berupa uang, barang atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan risiko sosial. Berdasarkan peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2017 bahwa program keluarga harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin yang kemudian diolah oleh pusat data dan informasi kesejahteraan sosial yang ditetapkan sebagai Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (PKH).

Berdasarkan rapat internal Presiden RI pada tanggal 2 maret 2023 mengenai kebijakan bantuan sosial dalam bentuk beras dan surat Kepala Badan Pangan Nasional Nomor: 82/TS.03.03/K/3/2023 tentang penyaluran cadangan pangan pemerintah dalam rangka pemberian bantuan pangan. Tujuan dari bantuan pangan ini adalah untuk mengurangi beban pengeluaran penerima bantuan pangan dan sebagai upaya untuk menangani kerawanan pangan, kemiskinan, stunting, gizi buruk, keadaan darurat, melindungi produsen dan konsumen serta mengendalikan dampak dari inflasi dan fluktuasi harga.

Menyikapi naiknya harga beras saat ini yang sekarang sudah mencapai harga Rp. 14000 sampai 15000/kg, Pemerintah mulai menyalurkan bantuan pangan cadangan beras bagi masyarakat yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kemensos. Harapannya dengan adanya bantuan tersebut dapat menekan harga beras dan membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari.

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan NonTunai. Dimana Menteri Sosial Ripublik Indonesia menimbang:

- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan dasar fakir miskin, negara melaksanakan penanganan fakir miskin dengan melakukan penyaluran bantuan sosial pangan secara non tunai dan akuntabel;
- Bahwa untuk menciptakan penyaluran bantuan sosial pangan yang lebih efektif, tepat sasaran, dan mendorong keuangan inklusif, perlu menyempurnakan Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai.

Dari hasil observasi awal penelitian dengan adanya bantuan sosial terutama Pada Program Bantuan Pangan Non-Tunai di Desa Pugaan Kecamatan Pugaan Kabupaten Tabalong. Desa Pugaan memiliki 5 Rukun Tetangga (RT) dengan luas wilayah 2,73 Km², memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.364 jiwa dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 422. Dan 140 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang menerima Bantuan Pangan Non-Tunai Berupa Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Dimana peneliti melihat dari banyaknya bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat miskin, namun banyak keluhan dari masyarakat Desa Pugaan bahwa *“ada masyarakat miskin yang tidak memperoleh bantuan Cadangan Beras Pemerintah (CBP)”* atau sebaliknya *“ada masyarakat yang tergolong mampu namun masih menerima bantuan Cadangan Beras Pemerintah (CBP)”*. Adapun juga kurangnya sosialisasi dari aparat Desa mengenai adanya BPNT berupa Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sehingga masyarakat mendapatkan informasi berupa berita dari

mulut kemulut yang membuat masyarakat kurang memahami mengenai bagaimana mekanisme adanya Program Bantuan Pangan Non-Tunai berupa Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang sebenarnya dan kurang jelasnya mengenai waktu pelaksanaan pembagian beras tersebut kepada masyarakat pada setiap bulannya, dikarenakan tidak adanya penjadwalan yang jelas mengenai waktu pembagian yang terkadang bisa terjadi diawal bulan, pertengahan bulan maupun akhir bulan. Ada 140 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Desa Pugaan Kecamatan Pugaan yang menerima Bantuan Pangan Non-Tunai Berupa Cadangan Beras Pemerintah (CBP) menunggu pembagian beras sebanyak 10kg/KPM tersebut.

Sehingga dengan adanya keluhan tersebut secara garis besar penulis dapat menemukan 3 (tiga) fenomena permasalahan terkait dengan Penerima Program Bantuan Pangan Non-Tunai Berupa Cadangan Pangan Pemerintah tersebut pada keluarga penerima manfaat di Desa Pugaan Kecamatan Pugaan yaitu sebagai berikut:

1. Masih ada masyarakat di Desa Pugaan Kecamatan Pugaan yang merupakan golongan miskin yang tidak masuk di dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) padahal DTKS merupakan basis data untuk penentuan sasaran penerima bantuan sosial yang dipakai oleh Kementerian Sosial seperti bantuan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dari Badan Pangan Nasional. Untuk mengatasinya Dinas Sosial Kabupaten Tabalong telah berupaya mengusulkan kepada Kementerian Sosial di bidang Badan Pangan Nasional masyarakat miskin yang belum masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk dapat dimasukkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), namun demikian tidak semua masyarakat miskin yang diusulkan akan diakomodir oleh Kementerian Sosial Badan Pangan Nasional. Berdasarkan dari koordinator Bantuan Pangan Non-Tunai berupa Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Desa Pugaan Kecamatan Pugaan Kabupaten Tabalong hal ini disebabkan oleh adanya ketidakcocokan atau tidak ditemukannya NIK Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang diusulkan ke Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan data NIK yang tercatat di Dukcapil Pusat. Masih ada masyarakat yang sudah dapat namun merupakan golongan berkecukupan yang masih menjadi penerima bantuan cadangan beras pemerintah. Untuk mengatasi hal tersebut pendamping Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam Bantuan Pangan Non-Tunai Cadangan Pangan Pemerintah telah berupaya melakukan pendekatan *purposive sampling* kepada masyarakat yang merupakan golongan sudah mampu atau berkecukupan tersebut agar mau graduasi sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) berupa Cadangan Pangan Pemerintah. (*Sumber Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Desa Pugaan Kecamatan Pugaan, 2023*).
2. Masih kurangnya sosialisasi dari Aparatur Desa mengenai adanya bantuan pangan Non-Tunai berupa Cadangan Pangan Pemerintah sehingga masyarakat mendapatkan informasi berupa berita dari mulut kemulut yang membuat masyarakat kurang memahami bagaimana mekanisme adanya program bantuan tersebut yang sebenarnya. (*Sumber: Informasi dari pihak masyarakat, 2023*).
3. Masih kurang jelas dalam waktu pelaksanaan pembagian beras kepada masyarakat setiap bulannya yang dikarenakan tidak adanya penjadwalan waktu pembagian yang jelas, terkadang bisa terjadi diawal bulan, pertengahan bulan maupun akhir bulan, ada 140 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Desa Pugaan Kecamatan Pugaan yang menerima Bantuan Pangan Non-Tunai berupa Cadangan Pangan Pemerintah, dimana mereka menunggu pembagian beras tersebut sebanyak 10kg/KPM. (*Sumber: Jadwal Pelaksanaan Pembagian Bantuan Pada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Desa Pugaan Kecamatan Pugaan, 2023*).

Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) berupa Cadangan Pangan Pemerintah harus dievaluasi agar program ini berjalan dengan optimal dan indikator keberhasilan dapat dicapai semaksimal mungkin. Dari uraian diatas terkait penyaluran bantuan, maka dapat disimpulkan bahwa penyaluran Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) berupa Cadangan Pangan Pemerintah di Desa Pugaan belum berjalan dengan baik. Mengenai kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa adanya permasalahan-permasalahan dalam proses penyaluran bantuan yang diberikan oleh pemerintah..

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Deskripsi kualitatif yaitu pengambilan data yang dapat dilakukan melalui observasi, wawancara maupun data dokumen. Pengambilan data yang dilakukan melalui wawancara dapat dilakukan melalui media telepon, video *konference* maupun tatap muka secara langsung. Dalam penelitian ini peneliti dapat memahami fenomena dalam konteks sosial secara alamiah yang menggambarkan permasalahan sosial pada seseorang mengenai sudut pandang perilaku. Dalam penelitian kualitatif peneliti menganalisis dan setelah itu melaporkan fenomena dalam suatu hasil analisa dalam penelitian.

Penelitian ini dilakukan di Desa Pugaan Kecamatan Pugaan Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan dengan objek yang dijadikan sumber dalam penelitian adalah: (1) Bagaimana Efektifitas Program Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Pugaan dan (2) Faktor pendukung dan penghambat Program Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Pugaan.

Metode pengumpulan dan menggunakan teknik: wawancara mendalam dilakukan dengan cara *Purposive Sampling* (pengambilan sampel secara sengaja) dengan para informan, observasi lapangan melalui cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang berlangsung, dokumentasi berupa foto-foto penelitian dalam kegiatan penelitian saat dilapangan. Teknik analisis data dengan kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan teori Efektivitas oleh Cambel J.P dalam Dyah Mutiarin, Arif Zaenudi, 2014: 96-97 dengan pengukuran efektivitas secara umum dan yang paling menonjol: keberhasilan program, keberhasilan sasaran, kepuasan terhadap program, tingkat input dan output, dan pencapaian tujuan menyeluruh.

1. Keberhasilan program

Efektivitas program dapat dijalankan dengan kemampuan operasional dalam melaksanakan program kerja yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, keberhasilan program dapat ditinjau dari proses dan mekanisme suatu kegiatan yang dilakukan dilapangan.

Pada indikator pengetahuan masyarakat sudah efektif. Hal ini dapat dilihat bahwa masyarakat sudah efektif dalam memahami *definisi* dari program bantuan pangan non-tunai ini. Pada indikator informasi yang didapat cukup efektif. Hal ini dapat dilihat dari sosialisasi yang diadakan pihak desa hanya sekali sehingga masyarakat masih kurang memahami mekanisme pelaksanaan program bantuan pangan non-tunai.

2. Keberhasilan sasaran

Efektivitas yang ditinjau dari sudut pencapaian tujuan dengan memusatkan perhatian terhadap aspek sasaran yang artinya efektivitas dapat diukur dengan seberapa jauh tingkat sasaran dalam program atau kebijakan dari pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Pada indikator kesesuaian data sudah dapat dikatakan cukup efektif. Hal ini dapat dilihat dari adanya ketidakcocokan data NIK yang diusulkan ke Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan data NIK dari Dukcapil Pusat. Sehingga masyarakat di Desa Pugaan ada yang tidak mendapatkan bantuan dikarenakan kesalahan dari data maupun kelengkapan persyaratan untuk mendapat program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). Maka untuk kesesuaian data masih diusahakan dari pihak desa agar masyarakat yang merupakan keluarga kurang mampu bisa mendapatkan bantuan pangan ini. Pada indikator Sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) sudah dapat dikatakan efektif. Hal ini dapat dilihat dari alur pelaksanaan yang sudah sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan sehingga pelaksanaannya sesuai dengan harapan.

3. Kepuasan terhadap program

Kriteria efektivitas yang mengacu pada keberhasilan program dalam memenuhi kebutuhan penerima program tersebut, kepuasan yang dirasakan oleh para penerima terhadap kualitas program yang dilaksanakan, semakin berkualitas suatu program yang diberikan maka kepuasan yang dirasakan oleh penerima akan semakin tinggi.

Pada indikator hasil yang dirasakan dapat dikatakan efektif. Hal ini dilihat dari kepuasan masyarakat yang merasa terbantu dengan adanya program bantuan pangan non-tunai ini sehingga mengurangi pengeluaran masyarakat yang merupakan bagian dari keluarga penerima manfaat. Pada indikator keberhasilan program dapat dikatakan sudah efektif. Hal ini dilihat dari kesesuaian program yang sudah dilaksanakan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

4. Tingkat input dan output

Pada efektivitas tingkat input dan output yang dapat dilihat dari perbandingan antara masukan (input) dengan pengeluaran (output). Jika output lebih besar dari input maka dapat dikatakan efisien dan sebaliknya jika input lebih besar dari output maka dapat dikatakan tidak efisien.

Pada indikator ketersediaan sarana dan prasarana dapat dikatakan masih cukup efektif. Hal ini dapat dilihat dari waktu dan tempat pelaksanaannya yang masih kurang tepat. Pada indikator ketersediaan produksi dapat dikatakan sudah efektif. Hal ini dilihat dari ketersediaan beras/pangan sesuai dengan jumlah penerima bantuan pangan non-tunai ini.

5. Pencapaian tujuan menyeluruh

Sejauh mana organisasi melaksanakan tugas untuk mencapai tujuan, dalam hal ini merupakan penilaian umum dengan sebanyak mungkin kriteria tunggal dan menghasilkan penilaian umum dari efektivitas organisasi.

Pada indikator perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat dapat dikatakan sudah efektif. Hal ini dapat dilihat dari berkurangnya pengeluaran masyarakat setiap bulannya karena dengan bantuan ini lebih meringankan perekonomian mereka. Pada indikator tercapainya tujuan dapat dikatakan sudah efektif. Hal ini dilihat dari kesesuaian dengan rencana dan tujuan dari pemerintah dan dari pihak Desa Pugaan dengan adanya program bantuan pangan non-tunai ini guna membantu dan mengurangi beban pengeluaran kebutuhan masyarakat yang merupakan keluarga penerima manfaat (KPM) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan yang ada di Desa Pugaan.

Melalui analisis dengan teori efektivitas Efektivitas oleh Cambel J.P dalam Dyah Mutiarin, Arif Zaenudi, 2014: 96-97, maka faktor yang mempengaruhi Efektivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai Berupa Cadangan Pangan Pemerintah Dalam Rangka Pemberian Bantuan Pangan Di Desa Pugaan Kecamatan Pugaan Kabupaten Tabalong meliputi:

1. Faktor pendorong yang ada pada program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) berupa cadangan pangan pemerintah dalam rangka pemberian bantuan pangan di Desa Pugaan Kecamatan Pugaan Kabupaten Tabalong yaitu
 - a. pelayanan yang baik
 - b. fasilitas yang memadai.
2. Faktor penghambat, faktor penghambat yang ada pada program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) berupa cadangan pangan pemerintah dalam rangka pemberian bantuan pangan di Desa Pugaan Kecamatan Pugaan Kabupaten Tabalong yaitu
 - a. kurangnya ketepatan waktu dalam pelaksanaan sosialisasi yang masih kurang jelas.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian serta kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Efektivitas Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) berupa cadangan pangan pemerintah dalam rangka pemberian bantuan pangan di Desa Pugaan Kecamatan Pugaan Kabupaten Tabalong dapat dikatakan Cukup Efektif, hal ini dapat dilihat dari aspek keefektifitasan program bantuan pangan non-tunai dalam bentuk beras/pangan yakni: (1) Keberhasilan Program, pengetahuan masyarakat yang sudah efektif. dan informasi yang didapat cukup efektif. (2) Keberhasilan Sasaran, kesesuaian data sudah dapat dikatakan cukup efektif. dan kesesuaian Standar Operasional Prosedur (SOP) sudah dapat dikatakan efektif. (3) Kepuasan Terhadap Program, hasil yang dirasakan dapat dikatakan efektif. dan keberhasilan program dapat dikatakan sudah efektif. (4) Tingkat Input dan Output, ketersediaan sarana dan prasarana dapat dikatakan masih cukup efektif. dan ketersediaan produksi dapat dikatakan sudah efektif. (5) Pencapaian Tujuan Menyeluruh, perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat dapat dikatakan sudah efektif. dan tercapainya tujuan dapat dikatakan sudah efektif.
2. Faktor yang mempengaruhi Efektivitas Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) berupa cadangan pangan pemerintah dalam rangka pemberian bantuan pangan di Desa Pugaan Kecamatan Pugaan Kabupaten Tabalong yaitu:
 - a. faktor pendorong yang ada pada program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) berupa cadangan pangan pemerintah dalam rangka pemberian bantuan pangan di Desa Pugaan Kecamatan Pugaan Kabupaten Tabalong yaitu (1) pelayanan yang baik, (2) fasilitas yang memadai.
 - b. faktor penghambat, faktor penghambat yang ada pada program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) berupa cadangan pangan pemerintah dalam rangka pemberian bantuan pangan di Desa Pugaan Kecamatan Pugaan Kabupaten Tabalong yaitu (1) kurangnya ketepatan waktu dalam pelaksanaan, (2) sosialisasi yang masih kurang jelas.

Untuk tercapainya pelaksanaan program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) berupa cadangan pangan pemerintah dalam rangka pemberian bantuan pangan di Desa Pugaan, adapun saran yang dapat peneliti berikan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepada Kepala Desa Pugaan, sebaiknya dapat mengusahakan waktu pelaksanaan yang tepat sehingga masyarakat yang merupakan keluarga penerima manfaat menerima bantuan pangan ini tidak kebingungan dalam waktu pengambalian bantuan. Perlu adanya kepastian dalam waktu yang lebih ditepati lagi agar masyarakat tidak kebingungan dalam waktu penyaluran bantuan pangan non-tunai ini contohnya mengadakan pengumuman beberapa hari sebelum pelaksanaan penyaluran bantuan pangan non-tunai ini dilaksanakan.

2. Kepada Aparatur Desa Pugaan, diharapkan agar sebaiknya melakukan sosialisasi lagi tentang bantuan pangan non-tunai berupa cadangan pangan pemerintah dalam rangka pemberian bantuan pangan di Desa Pugaan, agar masyarakat yang terdaftar dalam bantuan pangan non-tunai ini lebih memahami bagaimana mekanisme pendaftaran dalam Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) sehingga tidak ada kesulitan lagi dalam pendaftaran maupun kesalahan NIK yang diusulkan ke Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan data NIK yang terdaftar di Dukcapil.
3. Kepada Koordinator Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) Kantor Desa Pugaan, perlu lebih diperhatikan penyaluran bantuan pangan non-tunai untuk masyarakat yang benar-benar kurang mampu agar lebih tepat sasaran dan diharapkan untuk kedepannya program ini akan terus berjalan agar masyarakat yang kurang mampu bisa mendapatkan kebutuhan pangan. Contohnya melakukan pendataan kembali mengenai kondisi ekonomi masyarakat yang merupakan keluarga kurang mampu.
4. Kepada masyarakat yang merupakan keluarga penerima manfaat diharapkan agar bisa meluangkan waktunya apabila ada pemberitahuan mengenai sosialisasi program bantuan pangan non-tunai selanjutnya yang diberikan dari pihak Kantor Desa Pugaan, sehingga tidak ada kebingungan lagi dalam proses pendaftaran penerima bantuan pangan non-tunai ini. (Setiawan, Sukristyanto and Ibnu Rochim, 2021; Affrian, Sos and AP, 2023; Saputra *et al.*, 2023)

DAFTAR PUSTAKA

- Affrian, R., Sos, S. and AP, M. (2023) *Model-Model Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan*. CV. Bintang Semesta Media.
- Saputra, T. *et al.* (2023) "Bibliometric Studies and Public Administration Research Potential on Stunting Problems," *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 6(2), pp. 197–211.
- Setiawan, I., Sukristyanto, A. and Ibnu Rochim, A. (2021) "The Implementation of Law Number 16 of 2019 a Case Study of Early Marriage Prevention in Hulu Sungai Utara Regency Indonesia," *Journal of Public Policy and Administration*, 5(3), p. 117.
- Affrian, R. 2022. *Tim Penyusunan dan Penulisan Buku Pedoman Skripsi*. Amuntai: Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai (STIA).
- Amrizal, D. dkk. 2018. *Penanggulangan Golput dalam Pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pilkada*. Medan: Instansi.
- Badu, S.Q. 2017. *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*. Gorontalo: Jalan Gelatik No.24 Kota Gorontalo.
- Bormasa, F. 2022. *Kepemimpinan dan Efektivitas Kerja*. Jawa Tengah: CV. Pena Persada.
- Diana, S. 2020. *Efektivitas Pengelolaan Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)*. Universitas Wijaya Putra.
- Fathoni, A. 2014. *Organisasi dan Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Gunawan, I. 2015. *Metode penelitian kualitatif teori dan praktik*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Hanum, S. 2019 *Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) Dalam Pengentasan Kemiskinan di Kecamatan Medan Johor*. Universitas Sumatera Utara.
- Hardani, dkk. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmi.
- Haryatmoko. 2011. *Etika Publik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

- Ibrahim. 2018. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Makasar: Gunadarma Ilmu.
- Irwan, J.T. 2017. *Peran Badan Narkotika Nasional*. Yogyakarta: CV. Budi Utama.
- Maharani Puan. 2019. *Buku Pedoman Umum Bantuan Pangan Non Tunai*. Jakarta: Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai.
- Mutiarin, D. dan A.Z. 2014. *Manajemen Birokrasi dan Kebijakan Penulusuran Konsep dan Teori*. Yogyakarta: Instansi.
- Pasolong, H. 2019. *Teori Administrasi publik*. Bandung: Alfabeta, cv.
- Pasolong, H. 2020. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Peraturan Menteri Keuangan RI. 2016. *Peraturan Menteri Keuangan No 228/pmk.05/2016 tentang perubahan atas PMK No.254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga*.
- Peraturan Menteri Sosial RI. 2019. *Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai*
- Peraturan Menteri Sosial RI. 2019. *Peraturan Menteri Sosial Republic Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Penyaluran Belanja Bantuan Sosial Di Lingkungan Kementerian Sosial*.
- Pinto, H.G. 2015. *Analisis Perbandingan Efektivitas Penjualan Online dan Konvensional*. Universitas Sanata Dharma.
- Sucahyowati, H. 2017. *Pengantar Manajemen*. Malang: Willis.
- Sugiyono. 2017. *Metode penelitian kebijakan*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sugiyono. 2017. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sutrisno, E. 2017. *Manajemen sumber daya manusia*. Makasar: Kencana.
- Sutrisno, E. 2018. *Budaya Organisasi*. Makasar: Prenadamedia Group.
- Milasari D, A.S. 2020. *PROGRAM BANTUAN SOSIAL, DAN AKUNTABILITASNYA*. Available at: <https://djp.kemenkeu.go.id/kppn/ketapang/id/data-publikasi/artikel/3080-program-bantuan-sosial-dan-akuntabilitasnya.html>. Diakses tanggal 23 Oktober 2023.
- Muanley, Y. 2016. *Definisi efektivitas dalam teori manajemen pendidikan*. Available at: <https://id.scribd.com/document/408717826/Definisi-Efektivitas-Dalam-Teori-Manajemen-Pendidikan>. Diakses tanggal 14 Oktober 2023